



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDERIMAN BUTAR BUTAR
2. Jabatan : ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
3. NHK : 415117

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.555.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/25 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 424 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. Tanah Seluas 1102 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/130 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/130 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.115.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 665.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
10. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 154.500.000

1. MOTOR, YAMAHA BK6 M/T /SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 9.500.000
2. MOBIL, MORRIS MINOR 1000 Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp.
45.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
4. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 37.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.067.861.644

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.814.361.644

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.814.361.644

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.